

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori

Berikut ini akan dijabarkan teori-teori yang mendasari penelitian ini, pada bab ini dijelaskan teori agensi yang digunakan untuk mendukung penelitian dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, serta penembangan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

2.1.1. Variabel Dependen

2.1.1.1. Opini Audit

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110 paragraf 01 (SPAP, 2001), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam melakukan auditor harus mengumpulkan bukti-bukti kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan perusahaan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan tersebut. Pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. Laporan audit yang mencakup paragraf,

kalimat, frasa, dan kata yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai laporan auditnya. Auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan dalam sebuah laporan.

Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yakni laporan audit bentuk baku. Laporan auditor bentuk baku terdiri dari tiga paragraph menurut (Mulyadi, 2002) yakni:

a. Paragraf pengantar (*introduction paragraph*)

Paragraf pengantar dicantumkan pada paragraf pertama laporan audit bentuk baku. Auditor mengungkapkan tiga fakta pada paragraf pengantar. Fakta pertama adalah pengungkapan tipe jasa yang diberikan auditor. Fakta kedua tentang objek yang diaudit. Selanjutnya, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya.

b. Paragraf lingkup audit (*scope paragraph*)

Paragraf lingkup audit berisikan pernyataan ringkas auditor mengenai lingkup audit yang dilaksanakan auditor. Selain itu, paragraf lingkup audit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

c. Paragraf pendapat (*opinion paragraph*)

Paragraf ketiga dalam laporan keuangan bentuk baku yakni paragraf pendapat yang digunakan auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2.1.1.2. Jenis-jenis Pendapat

Terdapat lima jenis pendapat auditor menurut Mulyadi (2002) yaitu:

(1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. Semua laporan - neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.

- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
- e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

- (2) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion reports with explanatory language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Ketidakkonsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan perusahaan.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.

- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
 - d. Penekanan atas suatu hal.
 - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
- (3) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila audit menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
 - b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- (4) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

- (5) Laporan yang didalamnya auditor tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion report*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Jika auditor merasa yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan maka auditor harus melakukan beberapa hal sebagai berikut (SPAP, 2001):

- a. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi dampak tersebut dan
- b. menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan. Jika manajemen tidak memiliki rencana maka auditor akan memberikan opini disclaimer.

2.1.1.3. Opini audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Auditor menetapkan penerimaan opini audit *going concern* apabila dalam proses audit ditemukan kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini meliputi (SA seksi 341):

- a. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus:
 1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 2. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah auditor masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Berikut ini adalah contoh

kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341) :

1. Trend negatif. Contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern. Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi. Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan,

yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.1.2. Variabel Independen

2.1.1.1. Keuangan

2.1.1.1.1. *Financial Distress*

Financial Distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. *Financial distress* (kesulitan keuangan) sebenarnya mempunyai berbagai definisi, tergantung pada cara pengukurannya. Baldwin dan Scott (1983) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Atmini dan Wuryana (2005) mendefinisikan *financial distress* jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi negative. Sedangkan Lau (1987) melakukan pemberhentian tenaga kerja. Tanda-tanda perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini *financial distress* diproksikan dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati (2010); Suparlan dan Andayani (2010). Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan

terhadap pihak luar (kreditur). Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Media yang dapat dipakai untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan.

2.1.1.1.2. *Debt Default*

Dalam PSA 30, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Manfaat status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church (1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini *going concern*. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah usai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan dalam keadaan default, tinggi sekali. Karenanya, diharapkan status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

2.1.1.2. Non Keuangan

2.1.1.2.1. Reputasi Auditor

Reputasi Auditor Craswell et al. (1995) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional adalah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review. Johnstone (1991) menunjukkan bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya Kantor Akuntan Publik tersebut.

DeAngelo (1981) mengatakan bahwa peningkatan kualitas audit akan mempertinggi skala Kantor Akuntan Publik yang juga akan berpengaruh pada klien dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. Economies of scale KAP yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. Fanny dan Saputra (2005) menggolongkan reputasi Kantor Akuntan Publik ke dalam skala big six firms dan non big six firms untuk melihat tingkat independensi serta kecenderungan sebuah Kantor Akuntan Publik terhadap besarnya biaya audit yang diterimanya. Mutchler (1986) menggunakan proksi skala Kantor Akuntan Publik untuk variabel reputasi Kantor Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang diberikan kepada perusahaan yang bermasalah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, proksi yang sering digunakan untuk menilai reputasi Kantor Akuntan Publik adalah dengan menggunakan skala Kantor Akuntan Publik. McKinley et al. (1985) menyatakan, ketika sebuah Kantor Akuntan Publik mengklaim dirinya sebagai Kantor Akuntan Publik besar seperti yang dilakukan oleh big four firms, maka mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut, mereka menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu nama besar mereka.

2.1.1.2.2. *Disclosure*

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang akan mempengaruhi atas suatu keputusan investasi. *Disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang memungkinkan pihak pengguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan. Informasi yang didapat dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Diharapkan dengan semakin transparan informasi yang disajikan oleh suatu perusahaan ditambah dengan semakin

jelas penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan keberhasilan bisnis dalam dunia usaha secara berkesinambungan, juga dapat digunakan untuk memahami bisnis pada suatu perusahaan (Anwar, 2010). Semakin memadainya pengungkapan atas informasi laporan keuangan dapat mengurangi resiko litigas sehingga, jika perusahaan mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini unqualified dari auditor eksternal.

Keuntungan dari pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan adalah sebagai berikut (Tanor,2009) :

1. Keuntungan terjadi apabila pengungkapan rinci mengenai produk baru dapat digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan di masa yang akan datang kepada para pemegang saham.
2. *Disclosure* dalam dunia investasi dapat berperan sebagai *public relation* bagi perusahaan yang berhubungan dengan komunitas investasi setiap saat, sehingga melalui disclosure masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan.
3. *Disclosure* perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi.

Konsep pengungkapan yang digunakan (Hendriksen dan Breda, 2002) yaitu:

1. *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup), konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), tujuan etis adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan.

Pengungkapan (*disclosure*) yang diterbitkan perusahaan ada dua jenis, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dahlan (dalam Tanor, 2009) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan sukarela adalah merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan public telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang: (1) Kewajiban penyampaian

laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. (2) Bentuk dan isi laporan tahunan.

Tabel 2.1
Disclosure Items

No	Keterangan
1.	Ikhtisar data keuangan penting
2.	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan
3.	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan.
4.	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi.
5.	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan.
6.	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha.
7.	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan.
8.	Nama dan alamat perusahaan
9.	Riwayat singkat perusahaan.
10.	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.
11.	Struktur organisasi dalam bentuk bagan.
12.	Visi dan misi perusahaan
13.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15.	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16.	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya
17.	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut
18.	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan
19.	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20.	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional
21.	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan
22.	Tinjauan operasi per segmen usaha
23.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya

24.	Prospek usaha dari perusahaan	
25.	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan , antara lain : strategi pemasaran dan pangsa pasar	
26.	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen	
27.	Tata kelola perusahaan (Corporate Governance)	
28.	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan	
29.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	
30.	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris	
31.	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan	
32.	Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun	
33.	Informasi tentang penelitian dan pengembangan	

Sumber : Disclosure Index (Fitriani dan Dharna, 2007)

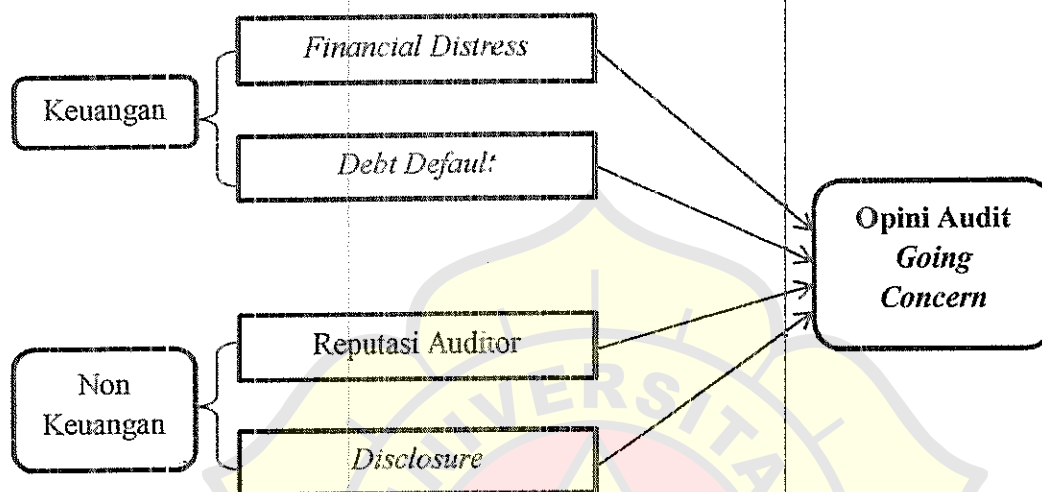
Penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan disclosure item pada lampiran A digunakan untuk menentukan disclosure yang disajikan oleh perusahaan. Setelah melakukan scoring, disclosure dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan gambar diatas analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*, yaitu *financial distress*, *debt default*, reputasi auditor, *disclosure*, dan berikut penjelasannya:

Pada kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara variabel independen (*financial distress*, *debt default*, reputasi auditor, *disclosure*) dan variabel dependen yaitu penerimaan opini audit *going concern*. Pada perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan banyak ditemukan indikator yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha. McKeown et al., (1991) menemukan bukti bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*. Dalam PSA 30, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*).

Auditor bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini *going concern* jika klien mendapatkan masalah berkaitan *going concern* perusahaan, untuk menjaga reputasi dan kualitas yang dimiliki auditor sehingga cenderung menghindari tindakan yang akan mengganggu nama besar mereka. Demi terhindar dari penerimaan opini *going concern* perusahaan menekan independensi auditor dengan menggunakan pergantian auditor bahkan perusahaan akan memberhentikan auditor apabila auditor cenderung memberikan opini *going concern*.

Semakin memadainya pengungkapan atas informasi laporan keuangan dapat mengurangi resiko litigasi. Oleh karena itu, jika perusahaan mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini *unqualified* dari auditor eksternal. Opini *going concern* lebih banyak ditemui ketika pengeluaran opini tertambat, sehingga diasumsikan karena suditor terlalu banyak melakukan tes, manajer melakukan negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan hidup atau auditor mengharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi untuk menghindari diterbitkannya opini *going concern*.

2.3. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh *financial distress*, *debt default*, reputasi auditor, *disclosure*, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1. Keuangan

2.3.1.1. *Financial distress*

Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan (Ramadhany, 2004). Kondisi ini digambarkan dengan rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi bahwa perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Perusahaan yang dalam kondisi baik akan memiliki profitabilitas yang besar cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga peluang mendapatkan opini yang baik juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas rendah. Perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik, maka auditor tidak akan mengeluarkan opini audit *going concern*. Penelitian kali ini akan dilakukan pengujian apakah *financial distress* mempengaruhi opini audit *going concern*, dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : *financial distress* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

Ha : *financial distress* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.3.1.2. *Debt Default*

Pada SAS 59 menyatakan bahwa *default* utang dan restrukturisasi utang sebagai indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Manfaat status *default* hutang sebelumnya telah diteliti oleh Januarti (2009) yang menemukan hubungan yang kuat status *default* hutang terhadap opini *going concern*. Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan.

Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya status *debt default*, semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Pada penelitian kali ini akan dilakukan pengujian apakah *debt default* mempengaruhi opini audit *going concern*, dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : *Debt Default* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

Ha : *Debt Default* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.3.2. Non Keuangan

2.3.2.1. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik. Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasionallah yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya *peer review*. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern* demi menjaga reputasi mereka. Mutchler (1986) (dikutip oleh Fanny dan Saputra, 2005) menggunakan proksi skala Kantor Akuntan Publik untuk variable reputasi Kantor Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang diberikan kepada perusahaan yang bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa auditor skala besar cenderung menerbitkan opini audit *going concern* dibandingkan auditor skala kecil. Pada penelitian kali ini akan dilakukan pengujian apakah reputasi auditor mempengaruhi opini audit *going concern*, dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : Reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

Ha : Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

2.3.2.2. Disclosure

(SAS) 160 menunjukkan bahwa auditor harus memeriksa konsistensi informasi yang diungkapkan dengan indikator keuangan perusahaan, seperti ditunjukkan oleh rasio keuangan. Keterbukaan informasi, termasuk fakta bahwa perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan dan bahwa manajemen mencoba untuk memecahkan masalah. Dye (1991) (dikutip oleh Junaidi dan Hartono, 2010) menyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kegiatan perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik antara investor dan manajemen. Semakin tinggi *disclosure level* yang dilakukan perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang ada. Semakin luasnya informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Junaidi dan Hartono, 2010). Perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini *unqualified* dari auditor eksternal (Gaganis dan pasicouras 2007). Pada penelitian kali ini akan dilakukan pengujian apakah *disclosure* mempengaruhi opini audit going concern, dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : *Disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*

Ha : *Disclosure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*